

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung 1983.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Fajar ND, Yulianto dan Achmad, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Hajati, Sri dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan - Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Iskandar, Mudakir, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Noorsy, Ichsanudin, *Nasionalisme vs Kebebasan Investasi: dalam materi Diskusi*, Bandung, 2012.
- Pusat Bahasa, *Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat bahasa, Jakarta, 2008.
- Satriyo Wibowo, Ari, *27 Siasat Jitu Menembus Pasar Sekaligus Meraih Posisi Pemimpin Pasar*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

- Mahendra, A.A. Oka, *Menguak Masalah Hukum Demokrasi Dan Pertanahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Santoso, Urip, *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2009
- _____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Salindeho, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah, 2004.
- Sw Sumardjono, Maria, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, 2009.
- _____, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- _____, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Swasono, Sri Edi. *Indonesia Is Not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*. Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2007.
- Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tehupeiory, Aartje, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2017.

Widjajono, *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, Development Studies Foundation, 2009.

Zaman, Nurus, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Marcel, Patrick R.P. Heller and Valérie “*Institutional Design in Low-Capacity Oil Hotspots*”, Revenue Watch Institute, April 2012.

Jurnal

Baihaqi, “Landasan Yuridis Terhadap Aturan hukum tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol 2, no 2, (Mei 2014).

Dwi Qurbani, Indah, Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, *ARENA HUKUM* Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.

Koeswahyono, Imam Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, 2008.

Nizamuddin, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016.

Qurbani, Indah Dwi, Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.

Soenarto, “Peluang Bagi Penyelesaian Konflik Agraria Di Sub Sektor 1 Pertambangan Umum”, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 9 No.1 April 2004.

Sufriyadi, Yanto, Pengertian Kepentingan Umum Menurut Para Ahli, Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol. 20 No.1, Fakultas Hukum, UII, 2013.

Sulaiman, Rekonstruksi Hukum Minyak Dan Gas Bumi Yang Berkeadilan Di Indonesia, *Jurnal, Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 18, Nomor 2, (Agustus, 2016).

Zakie, Mukmin, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), *Jurnal*, Jurnal Hukum Nomor Edisi Khusus Volume 18 Oktober 2011.

Tesis/Disertasi

Sekarmadji, Agus, *Prinsip-Prinsip Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Perumahan*. Disertasi, Universitas Airlangga, 2010.

Peraturan Perundang – Undangan/Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324).

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pemsertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

Website

<http://www.gultomlawconsultants.com/bentuk-bentuk-kontrak-pengelolaan-minyak-dan-gas-di-indonesia/>.

<https://katadata.co.id/berita/2019/01/28/industri-hulu-migas-dapat-kemudahan-pembebasan-lahan>.

Sumarto, SH., M.Eng., 2015, Kebijakan Pertanahan dalam Mendukung Industri Hulu Migas, <http://mas-marto.blogspot.com/2015/03/kebijakan-pertanahan-dalam-mendukung.html>.